

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelapor, yang merupakan informasi mengenai sumber daya ekonomi entitas dan klaim terhadap entitas pelapor. Laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah sumber daya ekonomi dan klaim entitas. Kedua jenis informasi tersebut menyediakan masukan yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi yang berkualitas agar pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan tepat.

Informasi dikatakan berkualitas bila informasi tersebut relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Selain itu, akuntabilitas suatu entitas dapat ditingkatkan jika informasi keuangan yang diberikan dapat dibandingkan (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan dapat dipahami (*understandable*). Kualitas informasi keuangan juga harus tertuju pada standar-standar pelaporan yang ada. Dalam dunia internasional, standar tersebut disebut *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Sedangkan untuk Indonesia, standar akuntansi disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan

(DSAK). Standar tersebut terdiri dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Syariah (SAS).

Informasi keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh entitas bisnis saja. Entitas nirlaba juga diharuskan membuat pelaporan keuangan yang berkualitas yang sesuai dengan standar yang ada yaitu PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Walau pun harus membuat pelaporan keuangan, pada dasarnya entitas nirlaba dengan entitas bisnis memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dalam menjalankan kegiatannya, entitas nirlaba tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Apabila entitas nirlaba memperoleh surplus, maka surplus tersebut akan dikontribusikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik, dan bukan untuk memperkaya pemilik entitas nirlaba tersebut. Akan tetapi, entitas nirlaba sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan selalu merugi. Hal ini menyebabkan akuntansi untuk entitas nirlaba pun turut berkembang dengan sangat pesat dalam waktu yang relative singkat.

Dalam pembuatan laporan keuangan, entitas nirlaba pastinya membutuhkan akuntansi yang sesuai dengan tujuan utama entitas. Akuntansi tersebut adalah akuntansi sektor publik. Pengembangan akuntansi sektor publik atau yang biasa digunakan oleh entitas nirlaba dilakukan untuk memperbaiki praktik yang ada saat ini. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas nirlaba, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Kualitas informasi keuangan tersebut untuk

membuktikan akuntabilitas entitas yang dituntut oleh *stakeholder* entitas. Tuntutan akuntabilitas entitas nirlaba terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Entitas nirlaba tetap perlu membuktikan akuntabilitas dan transparansinya yang merupakan dua elemen dasar dari *good governance*. Dengan kedua elemen tersebut, maka para *stakeholder* dapat melihat dan menilai kinerja entitas nirlaba. Peranan akuntansi sangat dibutuhkan dalam membuktikan akuntabilitas dan transparansi entitas nirlaba yaitu untuk mencegah atau menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana yang dikumpulkan dari *stakeholder* melalui laporan keuangan yang dibuat. Selain memiliki berbagai kegunaan, laporan keuangan sekaligus berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi entitas nirlaba kepada semua pihak yang menanamkan dan mempercayakan pengelolaan dananya.

Entitas nirlaba sendiri biasanya terdiri dari tempat beribadah, sekolah negeri, rumah sakit dan klinik publik, entitas politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, entitas jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut, riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Salah satu entitas nirlaba yang termasuk dalam tempat beribadah adalah Gereja. Keuangan gereja diatur dalam salah satu bidang akuntansi sektor publik yaitu bidang akuntansi tempat peribadatan. Akan tetapi, akuntansi sektor publik harus mengikuti standar pelaporan yang ada sehingga menjadikan gereja adalah salah satu entitas nirlaba yang harus mengikuti PSAK No. 45 sebagai standar pelaporannya.

Pengelolaan keuangan merupakan masalah yang seringkali terabaikan oleh Gereja yang kemudian berdampak pada pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi. Laporan keuangan yang berkualitas akan sangat membantu Gereja dalam menunjukkan akuntabilitasnya. Dengan akuntansi yang memadai, maka Gereja dapat memenuhi persyaratan pelaporan keuangan entitas nirlaba berdasarkan PSAK No. 45.

Gereja Bethel Indonesia (GBI) ITC Cipulir adalah salah satu gereja yang memiliki banyak jemaat dan kegiatan rutin. Gereja besar seperti GBI ITC Cipulir seharusnya membuat pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar agar terjamin akuntabilitasnya dan mengutamakan transparansi kepada *stakeholder*. Pelaporan yang sesuai dengan standar menunjukkan kualitas informasi keuangan yang diberikan pun sudah terpercaya dan akuntabilitasnya dapat diakui. Biasanya, Gereja membuat laporan keuangan yang mudah. Selain karena kurangnya pekerja kantor gereja yang ahli, juga disebabkan kurangnya fasilitas yang memadai sebagai tempat pekerja keuangan gereja melakukan tugasnya. Maka itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang penerapan PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangan di salah satu entitas nirlaba keagamaan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas gereja tersebut. Oleh karena itu, penulis memilih judul **“ANALISIS KUALITAS INFORMASI KEUANGAN UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) ITC CIPULIR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penyajian laporan keuangan entitas nirlaba bertujuan agar akuntabilitas entitas meningkat. Berdasarkan hal tersebut, laporan keuangan harus disajikan dengan benar sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Dalam hal ini mengacu pada PSAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia, PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Terkait dengan hal tersebut, perumusan masalah yang timbul adalah:

1. Apakah GBI ITC Cipulir sudah menunjukkan akuntabilitasnya melalui pembuatan laporan keuangan?
2. Apakah GBI ITC Cipulir sudah menerapkan ketentuan PSAK No. 45 dalam membuat laporan keuangan? Jika belum, apasajakah laporan yang telah dibuat?
3. Apakah informasi keuangan yang disajikan sudah memenuhi syarat kualitas informasi yang baik?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **C.1 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini pembahasannya diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada, yaitu:

1. Menganalisis penyusunan laporan keuangan GBI ITC Cipulir dengan mengacu pada ketentuan PSAK No. 45;

2. Membandingkan tata cara penyusunan bentuk dan isi laporan keuangan GBI ITC CIPULIR dengan PSAK No. 45. Dan untuk mengetahui apakah PSAK No. 45 sudah diterapkan secara penuh atau tidak.

## **C.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi GBI ITC CIPULIR :
  - a. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 agar dapat meningkatkan akuntabilitas gereja.
  - b. Sebagai sarana dalam mewujudkan entitas keagamaan yang tidak berorientasi pada laba, mengutamakan kejujuran dalam bidang pelayanan, serta transparan.
  - c. Membangun kerjasama yang baik dengan Universitas Negeri Jakarta.
2. Bagi Pembaca:
  - a. Sebagai sumber informasi mengenai aktivitas internal dan eksternal yang dilakukan oleh entitas keagamaan.
  - b. Menambah pengetahuan mengenai akuntansi untuk entitas nirlaba, khususnya dalam bidang keagamaan yaitu Gereja.
3. Bagi Penulis:
  - a. Melakukan *link and match* antara teori yang diperoleh dengan praktek akuntansi di bidang sektor publik.